

## BAB II

### STUDI PUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Teori Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004 : 9) pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Dara Indonesia.
2. Memajukan Kesejahteraan Umum.
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
4. Melaksanakan Ketertiban Umum, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

Menurut pendapat Rasyid (2000 :13) Keberadaan pemerintahan pada awalnya adalah kebutuhan, kebutuhan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara (Yusri Munaf:Pendahuluan : 47)

Menurut Ndraha (2005 : 36) Ilmu Pemerintahan adalah suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan msyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintahan.

Pendapat Syafiie (2003:4) secara etimologi Pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

Apabila ditinjau dari defenisi pemerintah, Syafiie (2009 : 20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaataan.

Sedangkan dalam konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie 2009 : 21) mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan terlaksana secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan ( baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa atau pun gejala pemerintahan, secara baik dan benar. (Syafie, 2011:23)

Menurut H.A Brasz (dalam Syarifin dan Dedah Jubaedah,2006 : 73) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara lembaga pemerintahan umum difungsikan baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

## **2. Teori Kebijakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak ( tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya ), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha menapai sasaran.

Kemudian menurut Mustofa (dalam Nurkholis, 2005:158) Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus sasaran atau pun unit organisasi pelaksana kebijakan.
2. Penetapan atau pelaksana dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Selanjutnya menurut Wahab (2005 : 3) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah/hambatan dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

### 3. Teori Evaluasi

Subarsono (2009 : 119) mengemukakan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat tingkatan kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberkan input bagi kebijakan yang akan datang upaya lebih baik.

Menurut Nurkholis (2005 : 169) Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan.

Menurut Rossi, Freeman dan Wright (dalam Ekowati, 2005 ; 58) mengatakan bahwa secara umum ada empat macam bentuk evaluasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi perencanaan.
- b. Evaluasi proses/program.
- c. Evaluasi dampak.
- d. Evaluasi terhadap sumber.



Menurut Ndraha ( 2003 : 201 ) juga menyatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut Ndraha (2003 : 201) adalah :

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*.
2. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan)

Dalam kajiannya tentang pelayanan social, Boyle ( dalam Suharto, 2005:120) Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes) dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan social kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sosial masukan.
2. Sosial keluaran.
3. Sosial hasil.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksana atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang memungkinkan terjadi diluar social.

Menurut Scriven Michael (2008 ; 22) evaluasi bukan merupakan persoalan opini atau selera, evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang penting.

Parson ( 2006 : 547 ) mengatakan bahwa evaluasi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk analisis lainnya berdasarkan enam hal diantaranya :

1. Evaluasi dimaksudkan untuk pembuatan keputusan dan untuk menganalisis problema seperti yang didefinisikan oleh pembuat keputusan bukan oleh priset.
2. Evaluasi adalah penilaian karakter.
3. Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam settingan kebijakan, bukan dalam settingan akademik.
4. Evaluasi seringkali melibatkan priset dan praktisi.
5. Evaluasi biayanya tidak dipublikasikan.
6. Evaluasi mungkin melibatkan priset dalam persoalan kesetiaan pada agen pemberi dana dan peningkatan perubahan social.

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat dan mengukur tindakan kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan yang

dikembangkan dan dilaksanakan, serta digunakan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan sejauh mana tujuan dicapai.

Dilihat dari sudut pandang siklus kebijakan, evaluasi biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktifitas yang berusaha menyoroti apa yang terjadi sesudah kebijakan public tertentu diimplementasikan atau ditransformasikan dalam berbagai bentuk tindakan-tindakan rutin birokrasi. Saat yang tepat untuk mempertimbangkan perlunya melakukan evaluasi pada tahap penyeleksian opsi dan pada tahap mendesain program.

Lester Stewart (dalam Agustino, 2006 : 175) “Evaluasi ditinjau untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.

Menurut Dunn dalam bukunya *Analisa Kebijakan Publik* (2003 : 608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dengan penilaian.

Dunn lebih lanjut menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi antara lain :

1. Efektifitas yaitu apa yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

4. Perataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu.
6. Ketetapan yaitu apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai.

Dengan demikian evaluasi adalah rangkaian aktivitas fungsional yang berusaha untuk membuat penilaian melalui pendapat yang dikemukakan mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang tengah dan atau telah dilaksanakan. Maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

#### **4. Teori Organisasi**

Menurut James D. Mooney, (dalam Zaidan Nawawi 2013 ; 75) mendefinisikan organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Kemudian John D. Millet (dalam Zaidan Nawawi 2013 ; 75 ) mendefinisikan organisasi sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Messie (dalam Zulkifli, 2005 ; 128) organisasi merupakan suatu kerja sama atau sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para



anggota menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktifitas kearah pencapaian tujuan bersama.

Selanjutnya menurut Zulkifli (2005 : 131) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Sondang P. Siagian (2004 ; 22) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dimana terdapat ikatan seorang / beberapa orang yang disebut atasan seseorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.

## **5. Teori Manajemen**

Hasibuan (2007 ; 15) mengatakan bahwa fungsi manajemen memiliki hubungan dalam mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang lain. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan mendominasi dalam manajemen.

Fayol (dalam Hsibuan, 2007 ; 16) menyebutkan bahwa fungsi manajemen antara lain :

- a. Planning (perencanaan).
- b. Organizing (pengorganisasian).

- c. Commanding (pemberi perintah).
- d. Coordination (koordinasi).
- e. Controlling (pengawasan).

James A.F Stoner dan Charles Wankel dalam H.R Siswanto (2005 : 2) member batasan manajemen sebagai berikut :

“Managemen is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort members and of using all organizational recources to achieve stated organizational goals. ( Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian supaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi).”

Menurut Hersey dan Kenneth H. Blanchard dalam HB. Siswanto (2005 : 2) memberikan batasan manajemen yaitu sebagai berikut : ”as working with and through individual and groups to accomplish organizational goals (sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi)”.

Sementara Hersey dan Blancard dalam HB. Siswanto (2005 : 2) lebih menekankan bahwa defenisi tersebut tidaklah dimaksudkan hanya untuk satu jenis organisasi saja, tetapi dapat diterapkan pada bebagai jenis organisasi tempat individu dan kelompok terbesut menggabungkan diri untuk mewujudkan tujuan bersama.

Selanjutnya menurut GR. Terry dalam HB Siswanto (2006:18) mendeskripsikan bahwa fungsi – fungsi manajemen yang lebih dikenal dengan

istilah POAC terdiri dari: (1) Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengendalian (*Controlling*).

Kesimpulan yang dapat diambil dari dua pendapat tersebut adalah bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

## 6. Teori Tugas

Tugas menurut John dan Mary (dalam Moekijat, 1998 : 10) adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Sementara definisi tugas menurut Dale Yoder yaitu tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsure dalam suatu jabatan (dalam Moekijat 1998 : 9). Menurut Stone mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dalam Moekijat, 1998 : 10).

Sementara itu Rajasa, ( 2003 : 593 ) Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.

Selanjutnya Mathis dan Jhon H. Jackson (2004 : 237) menyatakan Tugas adalah suatu aktifitas pekerjaan yang khusus dan dapat diidentifikasi terdiri dari gerakan-gerakan.

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya.

## **7. Teori Tugas dan Fungsi Sekretaris**

Istilah sekretaris desa bersal dari bahasa latin yaitu secretum, yang artinya rahasia. Dalam bahasa Prancis disebut secretarie, dalam bahasa Belanda yaitu secretares, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut secretary yang berasal dari kata secret atau rahasia. Berdasarkan pemahaman morfologis tersebut maka seorang sekretaris harus bias menyimpan rahasia yang tidak perlu diketahui oleh orang lain atau pegawai. (Efendy, 2010 : 117)

Tugas adalah pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah tugas



yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab suatu jabatan/bidang dalam organisasi.

Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. Selain itu dalam melakukan tugas sebagai tanggung jawab dalam jabatan organisasi anda perlu kerja sama dengan bidang-bidang (seksi - seksi) lain. Dalam melakukan tugas, setiap bidang dalam organisasi memiliki garis koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Fungsi kerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Setiap jabatan dalam organisasi mempunyai fungsi kerja yang berbeda, sesuai dengan bidangnya. Namun dapat diketahui bahwa dalam organisasi perlu ada kerja sama. Kerja sama ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Fungsi menunjukkan makna dari pekerjaan yang telah dan akan dilakukan. Dalam organisasi fungsi kerja benar – benar sangat diperlukan. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu kegiatan atau tujuan organisasi.

Sekretaris desa adalah seseorang yang memiliki fungsi melaksanakan pekerjaan surat, kegiatan maupun administrasi yang memiliki kadar rahasia yang umum menyangkut living organis. ( Sutarto, 1992 : 12 )

Sekretaris desa adalah bagian dari pemerintahan desa, yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala desa berdasarkan

ketentuan perUndang – undangan untuk melaksanakan tugas tersebut sekretasis desa mempunyai fungsi :

- a. Melakuan urusan surat – menyurat, kearsipan, dan pelaporan, melakukan urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi umum serta member pelayan teknis dan administrative kepada seluruh perangkat desa.
- b. Melaksanakn koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
- c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program – program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan kemasyarakatan.
- d. Melakuakan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Membantu menyusun program kerja tahunan dan pelapotannya.
- f. Melaksanakan administrasi pertanahan. ( Efendi, 2010 : 119)

#### **8. Teori Kinerja**

Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila,2010:71). Menurut pendekatan prilaku dalam manajemen, kinerja adalah kualitas atau kuantitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessel, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.(Mangkunagara,2002:22).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama priode tertentu selama melasanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan, seperti standar, hasil kerja, target atau sasaran atau kreteria yang telah ditentukan terlebih dahulu setelah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Indikator untuk mengatur kinerja secara individu ada lima indikator (Robbins, 2006:260) yaitu :

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kualitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi ( tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja.

## **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir tentang Evaluasi Perbandingan Kinerja Sekretaris Desa yang Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Seberida Indragiri Hulu:

**Gambar II. I Kerangka Pikiran Evaluasi Tugas Sekretaris Desa Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.**





### C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam mengoperasionalkan konsep yang telah direncanakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian masing – masing konsep operasional tersebut :

1. Evaluasi adalah pembuatan kesimpulan atas dasar fakta dalam sebuah laporan yang mengarah sebab-sebab terjadinya suatu penyimpangan terhadap perencanaan semula.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat - istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan Pegawai Negeri Sipil untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
5. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.

6. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan desa.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II. 1 : Operasionalisasi Variabel tentang Evaluasi Tugas Sekretaris Desa Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir**

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Yang di Nilai (4)	Skala (5)
1. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu pemerintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.	Evaluasi tugas sekretaris desa dilingkungan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.	1. Efektifitas	1. Apakah pengisian buku induk penduduk desa, mutasi dan rekapitulasi penduduk desa telah tercapai 2. Adakah pengisian buku mutasi penduduk desa	Nominal
		2. Efesiensi	1. Adakah upaya dalam meningkatkan pengisian buku induk penduduk desa, mutasi dan rekapitulasi 2. Berapa banyak usaha yang dilakukan pengisian mutasi penduduk desa	Nominal

<p>2. Analisi menurut Dunn (2003:608), dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik</p>		<p>3. Kecukupan</p> <p>4. Pemeratan</p> <p>5. Reponsiv</p> <p>6. Ketepatan</p>	<p>1. Apakah upaya yang dilakukan memecahkan masalah terkait buku induk penduduk desa, mutasi, dan rekapitulasi penduduk desa</p> <p>2. Pencatatan data penduduk sementara</p> <p>1. Apakah pengisian buku-buku induk penduduk desa, mutasi, dan rekapitulasi penduduk desa merata</p> <p>2. Bagaimana hasil pengisian buku-buku induk penduduk desa, mutasi dan rekapitulasi penduduk desa merata</p> <p>1. Dampak kepada pemerintahan desa penisian administrasi</p> <p>2. Dampak kepada masyarakat dengan pengisian buku administrasi penduduk</p> <p>1. Apakah hasil yang dicapai dapat memberi manfaat</p> <p>2. Bagaimana hasil dicapai</p>	<p>Nominal</p> <p>Nominal</p> <p>Nominal</p> <p>Nomina</p>
---	--	--	---	--

Sumber: Olahan Penulis 2018

### E. Teknik Pengukuran

Setelah ditemukan konsep – konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas indikator evaluasi. Teknik pengukuran tersebut antara lain :

Baik : Apabila semua indikator berada pada kategori Baik atau jawaban Responden pada score  $> 67\%$

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 dari indikator variable berada pada kategori Baik atau jawaban responden berada pada score 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila satu atau tak satupun dari indikator variable berada pada kategori Baik atau jawaban responden berada pada score  $< 33\%$ .

Sedangkan untuk mengukur masing – masing indikator dalam variabel yang telah ditetapkan tersebut antara lain :

1. Efektivitas

Baik : apabila seluruh item-item indikator telah dilaksanakan atau jawaban responden berada skala  $>67\%$ .

Cukup Baik : apabila 2-3 dari item indikator dapat dilaksanakan responden berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya 1 dari 3 item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skala  $<33\%$

2. Efisiensi

Baik : apabila seluruh item-item indikator telah dilaksanakan atau jawaban responden berada skala  $>67\%$ .

Cukup Baik : apabila 2-3 dari item indikator dapat dilaksanakan responden berada pada skala 34%-66%.



Kurang Baik : apabila hanya 1 dari 3 item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skala <33%

3. Kecukupan

Baik : apabila seluruh item-item indikator telah dilaksanakan atau jawaban responden berada skala >67%.

Cukup Baik : apabila 2-3 dari item indikator dapat dilaksanakan responden berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya 1 dari 3 item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skala <33%

4. Pemerataan

Baik : apabila seluruh item-item indikator telah dilaksanakan atau jawaban responden berada skala >67%.

Cukup Baik : apabila 2-3 dari item indikator dapat dilaksanakan responden berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya 1 dari 3 item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skala <33%

5. Reponsivitas

Baik : apabila seluruh item-item indikator telah dilaksanakan atau jawaban responden berada skala >67%.

Cukup Baik : apabila 2-3 dari item indikator dapat dilaksanakan responden berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya 1 dari 3 item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skala <33%

6. Ketetapan

Baik : apabila seluruh item-item indikator telah dilaksanakan atau jawaban responden berada skala >67%.

Cukup Baik : apabila 2-3 dari item indikator dapat dilaksanakan responden berada pada skala 34%-66%.

Kurang Baik : apabila hanya 1 dari 3 item penilaian yang dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skala <33%

